

JURNAL

MASYARAKAT MARITIM

**MAPPING POTENSI BENCANA SOSIAL
DI KOTA BATAM**

Wahjoe Pangestoeti, Ramadhani Setiawan

**RASIONALITAS PILIHAN ORANG TUA TERHADAP
SISTEM FULL DAY SCHOOL DI LPI SABILILLAH MALANG**

Dedi Anggriawan

**STRATEGI ADAPTASI BUDAYA PARA EKSPATRIAT
DI TANJUNGBALAI KARIMUN**

Dinda Imelda, Marisa Elsera

**SIRI'NA PESSE DALAM MASYARAKAT BUGIS
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Zainal, Sri Wahyuni

**TINDAKAN ABORSI ILEGAL DI KECAMATAN
BUKIT BESTARI, TANJUNGPINANG**

Rahma Wati, Emmy Solina

Volume
2

Nomor
1

Halaman
1-53

Tanjungpinang
2018

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Masyarakat Maritim (JMM) Volume 2 No 1 tahun 2018 menerbitkan 5 artikel yang telah di seleksi oleh tim JMM, di antaranya ialah artikel yang berjudul *mapping* potensi bencana sosial di kota batam yang di teliti oleh Wahjoe Pangestoeti dan Ramadhani Setiawan melihat seberapa besar bencana sosial yang di alami masyarakat kota batam, selanjutnya ada Dedi Anggriawan yang meneliti seberapa besar rasionalitas pilihan orang tua terhadap *full day school* di LPI Sabilillah Malang. Kemudian Dinda Imelda d.k.k merajuk pada strategi adaptasi budaya para ekspatriat di Tanjung Balai Karimun.

Lalu Zainal dan Sri Wahyuni mengangkat siri' na pesse dalam masyarakat bugis di Kota Tanjungpinang dan artikel terakhir yang berjudul tindakan aborsi ilegal di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang di tulis oleh Rahma Wati dan Emmy Solina. Pengelola Jurnal Masyarakat Maritim mengucapkan terima kasih atas partisipasi penulis yang telah memyumbangkan tulisan demi kelancaran terbitnya Jurnal Masyarakat Maritim Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 Program Studi Sosiologi dan kami akan menunggu tulisan bapak/ibu untuk diterbitkan dalam edisi berikutnya. Selamat membaca . . .

Redaksi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Pengantar Redaksi | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| MAPPING POTENSI BENCANA SOSIAL DI KOTA BATAM | |
| Wahjoe Pangestoeti & Ramadhani Setiawan | 1 |
| RASIONALITAS PILIHAN ORANG TUA TERHADAP SISTEM <i>FULL DAY SCHOOL</i> DI LPI SABILILLAH MALANG | |
| Dedi Anggriawan | 16 |
| STRATEGI ADAPTASI BUDAYA PARA EKSPATRIAT DI TANJUNGBALAI KARIMUN | |
| Dinda Imelda & Marisa Elsera..... | 24 |
| SIRI' NA PESSE DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KOTA TANJUNGPINANG | |
| Zainal & Sri Wahyuni | 34 |
| TINDAKAN ABORSI ILEGAL DI KECAMATAN BUKIT BESTARI, TANJUNGPINANG | |
| Rahma Wati & Emmy Solina | 45 |

MAPPING POTENSI BENCANA SOSIAL DI KOTA BATAM

Wahjoe Pangestoeti

Dosen Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(wpangestoeti@yahoo.com)

Ramadhani Setiawan

Dosen Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(ramadhanisetiawan@gmail.com)

Abstract

Tranpormasi pembangunan akan memberikan pertama masalah keadilan sehingga semua orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa adanya gejolak dan gangguan sosial, kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang dan, ketiga partisipasi yaitu keikut sertaan semua pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses dan output. Dengan disentuhnya permasalahan di atas, maka pembangunan merupakan gerakan rakyat dan hanya dengan begitu pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna sebagai suatu daya dukung. Kota Batam adalah merupakan wilayah di provinsi Kepulauan Riau dengan penduduk yang paling banyak dan dengan banyak etnis juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang terjadi tidak saja dalam artian positif (regressive), tapi juga dalam bentuk negative (degressive), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan kelompok dalam masyarakat.

Kata Kunci: Mapping, Konflik, Bencana, Sosial

A. Pendahuluan

Dari tranformasi pembangunan akan memberikan *pertama* masalah keadilan sehingga semua orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa

adanya gejolak dan gangguan sosial, *kedua* kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi

mendatang dan, *ketiga* partisipasi yaitu keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses dan output.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang kemudian diarahkan untuk mengembangkan dan menyetarakan laju pertumbuhan daerah, antar kota dan desa, antar sektor serta antar daerah (Kartasasmita, 1996:335). Idealnya menempatkan manusia baik sebagai subyek maupun objek pembangunan adalah penting dan memandang lingkungan sosial sebagai suatu daya dukung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekarang tanpa mengurangi generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Soemarwoto, 1997:162). Menurut David Korton generasi sekarang tidak berhak mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu yang dapat membuat generasi mendatang tidak mungkin mempertahankan standar hidup manusiawi yang layak (Korton, 2001:112). Dari kedua konsep di

atas jelas faktor lingkungan sosial diperlukan mensosialisasikan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan yaitu a) terpeliharanya ekologi yang esensial b) tersedianya sumber daya alam yang cukup dan c) tersedianya kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional akan mendapatkan berbagai tantangan baru dalam proses globalisasi dewasa ini. Seiring dengan itu, masalah keamanan dan ketertiban umum (*social order*) juga dihadapkan pada tantangan tersendiri pada era reformasi dan demokratisasi yang kini tengah dihadapi Indonesia. Bidang pertahanan keamanan juga masih memerlukan tingkat *sense of crisis* yang tinggi serta menuntut sikap dan komitmen bersama yang kuat segenap komponen bangsa untuk mengelolanya.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah kepulauan yang ada di Indonesia berbagai masalah konflik sosial seperti politik, ekonomi, budaya, perseteruan antar dan antar umat

beragama, suku dan antar etnis, sengketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam, serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat adalah sebagian dari sekian banyak dari sumber konflik yang bisa mempengaruhi satu dan lainnya. Konflik-konflik yang terjadi juga tidak secara natural lahir dari unsur ketidakpuasan masyarakat, akan tetapi ini dapat pula lahir dari pemicu-pemicu konflik yang harus dideteksi sedini mungkin agar tidak menjadi melebar serta memberikan dampak *massive* kedepannya. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang terjadi tidak saja dalam artian positif (*regressive*), tapi juga dalam bentuk negatif (*degressive*), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan

kelompok dalam masyarakat. Sering pula terjadi perselisihan antar individu berkembang dan meluas menjadi konflik antar etnis, antar golongan, bahkan antar penganut agama yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum dan jatuhnya banyak korban jiwa yang tidak berdosa.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bahwa trend konflik beskala kecil dan sporadis meningkat serta menyebar hampir di seluruh di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Propinsi Kepulauan Riau. Jenis konfliknya pun sangat beragam seperti konflik yang berbasis politik, agama, etnik, antar aparat, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, rutin (tawuran, penghakiman massa, pengeroyokan) dan lainnya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan dan tidak ada antisipasi sejak dini dikhawatirkan dapat menyulut konflik sosial lebih besar.

Di samping itu penyelesaian konflik yang selama ini terjadi hanya sebatas penghentian kekerasan (seringkali peran pemerintah hanya sebagai pemadam kebakaran) atau baru damai negative belum

mengarah pada damai positif atau substansial.

Ini karena persoalan dasar penyebab konflik di masyarakat belum diselesaikan misalnya persoalan marginalisasi kelompok masyarakat, segregasi antar kelompok, persoalan mayoritas minoritas, persoalan penduduk asli dan pendatang, hancurnya ruang-ruang budaya, akses ekonomi, pendidikan dan, lapangan pekerjaan, pertanahan, kemiskinan dan lain-lain. Persoalan mendasar tersebut jika tidak diselesaikan maka kemungkinan konflik bisa terjadi lagi.

B. Pembahasan

1. Pemetaan Jenis Konflik

a. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan di Kota Batam terjadi sebagai akibat dari kedudukan pengelolaan Pulau Batam yang sebelum adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1999 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan konflik pertanahan yang

berkepanjangan yang memang sangat memperoleh karena persoalan konflik kewenangan. Badan Batam yang dahulu bernama Otorita Batam otoritas untuk mengusahakan kawasan Pulau Batam sebagai kawasan industri. Dengan demikian Hak Pengusahaan Tanah di Pulau Batam Batam. Otorita Batam perusahaan kawasan jangka waktu tertentu. pada awalnya memang berada di tangan Otorita lah yang memiliki kewenangan mendistribusikan industry pulau Batam kepada investor untuk Dalam perjalanan banyak Hak Guna Usaha yang diberikan atas lahan yang diberikan oleh pihak Otorita diolah dan dimanfaatkan, sehingga lahan-lahan tersebut produkti dan terbengkalai. Karena tidak dimanfaatkan Batam tidak menjadi tidak maka pihak Otorita Batam kembali mengeluarkan Izin untuk investor yang lain.

Dari sinilah kemudian muncul konflik masalah

kepemilikan lahan sering terjadi, sementara pihak Otorita Batam tidak mengambil keputusan yang tegas atas setiap sengketa yang muncul dikemudian hari. Bagi investor atau individu yang menginginkan mengusahakan lahan di kawasan pulau Batam, maka wajib membayar Uang Wajib Tahunan Otorita. Setelah melakukan pembayaran, maka pihak individu ataupun investor dapat mengusahakan lahan yang sudah diberikan izin oleh pihak Otorita. Kadangkala pihak individu ataupun investor mengalihkan status izin perusahaan lahan yang dimilikinya kepada pihak lain dengan imbalan konsensi yang tentunya menguntungkan. Hal ini menimbulkan potensi konflik dimasa yang akan datang jika pihak Badan Perusahaan Kawasan tidak ikut mengambil alih permasalahan yang muncul setelah dikeluarkannya izin perusahaan lahan.

Setelah reformasi tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah junto Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah salah satunya adalah untuk mengurus urusan pertanahan. Kota Administratif Batam ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom pada Tahun 1999. Hal ini lah yang menjadi akar permasalahan atas setiap konflik pertanahan yang terjadi di Kota Batam. Oleh sebab itu maka di antara Badan Perusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam harus menyelesaikan dualisme perusahaan lahan di Batam, Rempang, dan Galang dengan difasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk /diperjelas dan kewenangan oleh setiap masing-masing pemerintahan. Meskipun kedua-duanya merupakan

lembaga negara, pembentukan atas kedua lembaga pemerintah ini berbeda, namun dasar Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian konflik yaitu Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ, Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Walikota Batam, Ketua LAM dan Tokoh Masyarakat

b. Konflik Industrial;

Konflik ini seperti menjadi agenda tetap di Kota Batam, dimana setiap tahun disaat pemerintah daerah akan mengambil keputusan mengenai Upah Minimum Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Gubernur. Akar permasalahannya adalah perbedaan persepsi dari masing-masing pihak yang menterjemahkan maksud dari permenakertrans yang mensyaratkan pengambilan keputusan atas UMK adalah melalui hasil penilaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dimasing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan

usulan UMK dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan, yang mengacu kepada permenakertrans tentang pembentukannya termasuk unsur-unsur yang duduk sebagai perwakilan didalam Dewan Pengupahan.

Didalam dewan pengupahan sendiri selisih pendapat yang berujung pada tidak dapat diputuskannya secara musyawarah mufakat besaran angka KHL maupun UMK adalah karena perbedaan persepsi dalam penentuan komponen KHL. Dari sisi serikat pekerja, khususnya serikat pekerja metal, selalu menganggap bahwa survey yang dilakukan dalam menentukan KHL tidak dilaksanakan dengan benar, dan ada yang menuduh bahwa penentuan KHL adalah merupakan pesanan pihak-pihak tertentu. Disamping itu garis komando organisasi serikat pekerja yang berada dipusat, seringkali selalu dijadikan rujukan dan pemaksaan bagi serikat pekerja

didaerah untuk menuntut hal yang sama sebagaimana instruksi dari pengurus pusat mereka. Begitu juga dengan unsur pengusaha, mereka akan berupaya untuk mengusulkan angka yang rasional berdasarkan perkembangan ekonomi disekitaran. Begitun pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan juga dengan juga Kepala Daerah, harus memiliki ketegasan dan rasa sensitivitas terhadap kondisi Bipartit, yaitu pengusaha dan juga pekerja.

Keinginan pekerja menuntut besaran UMK yang besar dapat dimaklumi mengingat banyak kebijakan pemerintah yang dibuat, akhirnya menjadi merugikan masyarakat, terutama soal harga kebutuhan pokok serta barang dan jasa yang dinikmati oleh para pekerja. Pihak pemerintah daerah juga dalam membantu perputaran ekonomi, maka sebaiknya melakukan kontrol harga secara rutin. Dengan demikian peran pemerintah

yang seharusnya dimaksimalkan dalam melakukan kontrol harga, sehingga UMK tidak perlu ditetapkan dengan nilai yang tinggi, dan tentunya tidak memberatkan para pengusaha. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian konflik: Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ, Walikota Batam dan Dewan Pengupahan (unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Serikat Pekerja, Pengusaha)

c. Konflik Sosial;

Konflik berikutnya yang bersifat umum di Kota batam adalah permasalahan penolakan sopir taksi di Batam atas keluarnya izin operasi armada taksi Blue Bird. Pihak pengusaha dan pengemudi taksi di Batam keberatan dengan masuknya Blue Bird ke Batam akan pendapatan mereka. Sebab tanpa adanya Blue Bird di Kota Batam pendapatan pengemudi taksi sudah mulai menurun. Konflik penolakan dari pengemudi

teksi ini berlanjut sampai ke pengailan sebagai konsekuensi dari pembatalan secara sepihak izin operasioal teksi Blue Bird oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.

Hak tersebut jelas menunjukkan posisi pemerintah Kota batam yang tidak tegas dan tidak memiliki keperdulian terhadap penyediaan sarana transportasi public yang memuaskan bagi masyarakat. Konflik ini akhirnya bisa di selesaikan namun tetap masih memiliki bibit permusuhan, karena ternyata pasca dikeluarkannya keputusan PTUN atas gugatan Blue Bird dan dimenangkan oleh Blue Bird, satu armada Blue Bird sempat dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Teksi Blue Bird tersebut dirusak oleh oknum pengemudi teksi Batam yang menganggap bahwa Blue Bird telah melanggar kesepakatan dalam pertemuan unsur Muspida yang menetapkan bahwa Blue Bird

baru dapat beroperasi setelah satu tahun.

2. Peristiwa Konflik di Kota Batam

a. Kecamatan Kota Batam;

Jenis konfliknya yaitu konflik sosial, Aksi solidaritas atas penutupan Radio Era Baru Batam karena adanya permintaan dari pemerintah Rejim Partai Komunis China yang akan berburu mengintervensi Pemerintah RI untuk menutup siaran Radio Era Baru yang berbuntut dengan perampasan alat-alat siaran milik radio Era Baru oleh pihak dalam penetapan frekuensi radio. Dan direkturradio Era Baru di vonis bersalah karena dianggap melanggar UU. Radio Era Baru sering menyiarkan tentang komunitas Falun Dafa yang di negara asalnya China tidak diakui keberadaannya. Isunya adalah Radio Era Baru menyiarkan solidaritas atas perlakuan Pemerintah China terhadap komunitas Falun

Dhafa. Kemudian ada konflik industrial yang mana Buruh melakukan mogok nasional dengan melakukan aksi long march dan sweeping terhadap perusahaan-perusahaan yang masih melakukan kegiatan produksi, serta memaksa para buruh dan perusahaan untuk menghentikan aktivitas produksinya sebagai bentuk solidaritas sesama pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum kota. Buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Penghapusan Tenaga Kerja Outsourcing/Kontrak, serta penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyeluruh pada Tahun 2014.

b. Kecamatan Batu Aji

Konfliknya ialah tentang pertanahan dan tata ruang. Protes dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha Kawasan atas keluarnya Surat keputusan Menteri Kehutanan No.463 Tahun 2013 Tanggal 27 Juli

2013 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bubukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No.877 Tahun 2011. SK Menhut tersebut menetapkan sebagian kawasan yang telah diami oleh masyarakat menjadi kawasan hutan dilindungi yang berkonsekuensi bahwa status lahan yang mereka miliki adalah kawasan hutan lindung, begitu juga dengan kawasan Batam yang sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ juga masuk dalam kawasan hutanan jika mengacu pada SK Menhut tersebut. Isu yang beredar adalah Keluarnya SK Menteri Kehutanan No. 463 Tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2011 yang menetapkan RT/RW Batam adalah merupakan kawasan industri.

c. Kecamatan Batu Ampar

Konfliknya pertanahan dan tata ruang mengakibatkan bentrokan antara dua kelompok

yang bersengketa atas lahan PT. Hyundai Metal Indonesia yang berkedudukan di Batuampar oleh kubu Tony Fernando (PT. HMI) dengan kubu PT. Lord Way Accomodation Engineering (PT. LWAE) yang didukung Basri. Pada 14 Juni 2012 PN Batam memutuskan sengketa lahan seluas 4300 m² dengan memenangkan PT.LWAE, dan pihak PT.LWAE melalui kelompoknya langsung menguasai lahan yang di sengkatakan dan hal tersebut memicu perlawanan dari kelompok PT. HMI yang diposisi dikalahkan dan sedang mengajukan banding. Kelompok Tony Fernandez menyerang Hotel Planet Holiday di daerah Jodoh yang diketahui milik Karto. Dalam insiden penyerangan tersebut terdapat korban meninggal 1 orang. Isu yang berkembang di masyarakat ternyata penguasaan lahan PT.HMI oleh sekelompok orang dengan munculnya dokumen sertifikat

baru atas nama Jufeno Tan yang mengklaim lahan PT.HMI miliknya dengan membuat surat baru dengan dasar surat laporan kehilangan dari kepolisian, dan kemudian lahan tersebut dijadikan agunan di Bank BNI 46 dan selanjutnya terjadi proses secara cepat perpindahan kuasa atas lahan PT.HMI dari Jufeno Tan ke Karto pemilik Hotel Planet Holiday.

d. Kecamatan Belakang Padang

Konflik lingkungan menunjukkan yang berakibatkan ratusan nelayan Belakang Padang turun ke laut dengan menggunakan perahu menuju perairan Pulau Nipah untuk melakukan aksi demo mengusir kapal tanker milik asing yang berlabuh di perairan Pulau Nipah. Aktivitas kapal tanker asing yang berlabuh jangkar di lokasi perairan Pulau Nipah telah mengganggu aktivitas nelayan lokal saat menangkap ikan di lokasi tersebut. Isnya adalah Kapal-kapal tanker berbendera asing yang

berlabuh jangkar di perairan Pulau Nipah telah mencemari laut dengan hasil pembuangan limbah oli dan tank cleaning kapal, sehingga ada beberapa mempengaruhi tangkapan ikan para nelayan yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat setempat.

e. Kecamatan Bengkong

Konflik pertanahan ini membuat ratusan warga dari Kelurahan Bengkong Sadai menggeruduk kantor DPRD Batam tanggal 19 Februari 2012 menuntut Pemko Batam dan BP Batam agar bisa menyelesaikan permasalahan lahan di Bengkong Sadai. Para pendemo menuntut agar lahan mereka tidak diganggu oleh developer maupun investor. Lahan yang dipermasalahkan awalnya adalah lahan tidur yang kemudian dimanfaatkan oleh warga beberapa tahun dan kemudian muncul perusahaan tertentu yang mengklaim lahan tersebut. Isunya adalah Ada perusahaan yang mengklaim lahan di Bengkong Sadai, dan

kemudian melakukan perundingan dengan warga dan setuju untuk mengurus uang wajib tahunan otorita dengan biaya sebesar Rp. 800.000 per m², dimana tarif tersebut di luar dari tarif resmi yang sebesar Rp.45.000 per m².

f. Kecamatan Galang

Lagi –lagi konflik pertanahan membuat pedagang kecil di kawasan wisata Pantai Melur di Kelurahan Sijantung mendatangi kantor Walikota Batam untuk memprotes SK Walikota Batam yang menunjuk pengelola baru di kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian terdapat dua pengelola kawasan di Pantai Melur, yaitu pedagang yang lebih dulu mengelola kawasan tersebut dan pengelola baru yang ditunjuk berdasarkan SK Walikota Batam. Masyarakat meminta SK tersebut dicabut karena pedagang juga merasa diintimidasi oleh pengelola baru yang berjumlah tiga orang dan tidak memiliki lahan di kawasan tersebut, bahkan tarif yang

dipungut naik dari yang pernah dikelola oleh para pedagang yang berjumlah 40 pedagang. Isu yang mereka dapatkan ialah terbitnya SK Walikota bernomor KPTS 120/HK/III/2013 yang dipersepsikan oleh pedagang di Pantai Melur telah memberikan kewenangan pengelolaan kawasan wisata Pantai Melur kepada pihak tertentu dan termasuk penarikan pas masuk ke kawasan tersebut, dengan demikian ada dua pengelola di kawasan wisata Pantai Melur.

g. Kecamatan Lubuk Baja

Konflik tentang pertanahan ini mengakibatkan masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma tersulut oleh hadirnya sejumlah atau sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi massa tertentu dengan nama Laskar Merah Putih dan LSM Jogoboyo yang ikut mengamankan sebuah perusahaan pengembang yang lahannya masuk dalam wilayah kampung tua Tanjung Uma. Kemarahan warga

Tanjung Uma dipicu oleh pernyataan seseorang pejabat daerah yang menyulut kemarahan masyarakat kampung tua Tanjung Uma yang mengesankan pejabat daerah tersebut berpihak kepada pengusaha. Isu yang sangat menjadi prioritas yaitu hadirnya sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi massa tertentu dengan nama Laskar Merah Putih dan LSM Jogoboyo yang ikut mengamankan sebuah perusahaan yang pengembang lahannya masuk dalam wilayah kampung tua Tanjung Uma. Kemarahan warga Tanjung Uma dipicu oleh pernyataan seseorang pejabat daerah yang menyulut kemarahan masyarakat kampung tua Tanjung Uma yang mengesankan pejabat daerah tersebut berpihak kepada pengusaha.

h. Kecamatan Sekupang

Warga Kampung Agas berunjuk rasa ke BP Batam dan DPRD Kota Batam menuntut

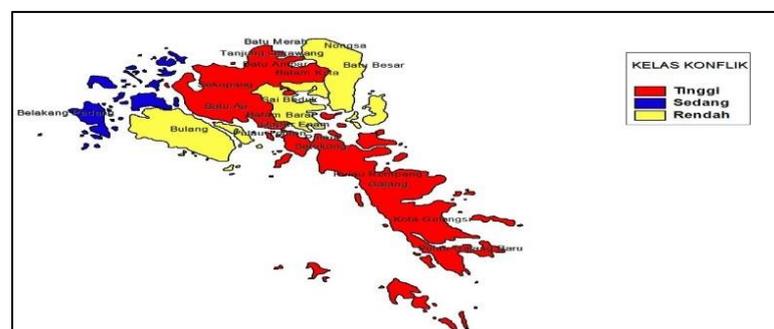
ganti rugi lahan kepada PT Daniel Maria Cindy yang berencana menggusur warga Kampung Agas yang mendiami lahan seluas 1,4 hektare. PT DMC mengklaim memiliki izin dari BP Batam, sementara masyarakat Kampung Agas mendiami lokasi dimaksud sejak dua puluh tahun yang lalu tanpa memiliki dokumen izin secara hukum. Isu yang terjadi yaitu sebuah PT DMC berencana menggusur lahan kampung agas seluas 1,4 hektare dan tidak pernah melibatkan warga Kampung Agas dalam hal ganti rugi lahan. Masyarakat meminta agar keberadaan mereka diakui

dengan adanya ganti rugi lahan karena merasa telah mendiami dalam jangka waktu yang lama

i. Kecamatan Sagulung.

Sejumlah juru parkir Sagulung Mall melancarkan aksi protes di depan Sagulung Mall pada tanggal 17 Juli 2013. Para juru parkir ini tidak menerima tindakan manajemen Sagulung Mall yang meniadakan uang parkir bagi pengendara tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini terjadi karena seiring terjadinya konflik diantara pedagang dan juru parkir dan sudah disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Batam, tapi tidak mendapat tanggapan.

Gambar 1.
Peta Konflik Bencana Sosial di Kota Batam



Sumber : Data Olahan 2018

C. Kesimpulan

Konflik yang terjadi di beberapa daerah terutama Kota Batam sebagai

besar di sebabkan sengketa lahan hal ini dikarenakan tidak pahamnya hukum oleh masyarakat maupun pihak swasta

yang beroperasi di perkebunan. Tidak adanya lembaga penangan konflik di setiap kabupaten ataupun Kota sehingga penangannya menunggu laporan dari masyarakat dan baru di tindak oleh pihak kepolisian. Konflik yang terjadi di beberapa Kabupaten di Kepulauan Riau pada prinsipnya secara umum diakibatkan oleh persoalan perebutan sumber daya alam ekonomi dalam hal ini lahan dan belum jelasnya tapal batas wilayah di daerah tersebut. Keterbatasan sumber daya alam seperti lahan berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini yang menyulitkan masyarakat untuk mencari penghidupan dalam rangka sebagai upaya meningkatkan perekonomiannya. Situasi masyarakat ini diperparah dengan sikap pemerintah pusat dalam memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan tanpa mendengarkan terlebih dahulu aspirasi masyarakat pada level bawah.

Kepentingan masyarakat dalam hal ini menjadi termarginalkan jika berhadapan dengan kepentingan pengusaha. Saran dari Peneliti ialah Harus ada lembaga independen yang menangani konflik di kabupaten, sehingga jika terjadi konflik cepat untuk

diselesaikan dan diantisipasi agar tidak terjadi konflik. Kemudian ada kerja sama antar pihak-pihak yang terkait sehingga konflik di Kabupaten dapat cepat di selesaikan. ada cadangan logistic untuk bantuan jika terjadi konflik sewaktu-waktu, hal ini di karnakan konflik di Kabupaten bisa terjadi sewaktu-waktu dan sulit untuk di prediksi kapan terjadinya serta ada pemberdayaan social mengenai kesadaran hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hokum atau anarkis jika terjadi kesalah pahaman atau konflik. Bagi pemerintah pusat disarankan agar dalam membuat kebijakan terlebih dahulu mencari data yang valid dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang minim berpotensi menyebabkan konflik. Bagi pemerintah daerah Kabupaten diharapkan terus melakukan usaha preventif agar konflik dapat diminmalisir dengan upaya mediasi bagi setiap kelompok yang bertikai. Bagi masyarakat diharapkan lebih mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah kemudian bagi perusahaan diharapkan

menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan tidak bersikap arogan dalam penyelesaian masalah.

Daftar Pustaka

- Bodine. R., Crawford. D., & Schrupf. F., (1994). *Creating the Peaceable School: A Comprehensive Program for Teaching Conflict Resolution*. Champaign, IL: Research Press, Inc.
- Castro. A. P and Nielsen. E. 2003. *Natural resource conflict management case studies: an analysis of power, participation and protected areas*. Food And Agriculture Organization, Rome.
- Chris Mitchell, 1981. *The Structure of International Conflict*, Mac Millan, London,
- Crawford. D., & Bodine. R., (1996). *Conflict Resolution Education: A Guide to Implementing Programs in Schools, Youth-Serving Organizations, and Community and Juvenile Justice Setting*. Report Program. USA: Departement of Justice and Department of Education
- Dharmawan. H. A. 2007. *Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, dengan tema: "Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional", Pontianak.
- Changh, William. 2001. "Dimensi Etis Konflik Sosial". Kompas. Rabu 2 Februari 2001.
- Glasser, W. (1984). *Control Theory*. New York: Harper & Row.
- Nairobi Peace Initiative-Africa, National Steering Committee on Peacebuilding and Conflict Management. 2012. *A Validated Report of the National Conflict Mapping and Analysis with Recommendations for Actors*. NPI-Africa and the NSC Secretariat, Kenya.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011. "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penangan Konflik Sosial". Kemenkumham RI
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Alfabeta, Bandung
- Yumi. Hastuti, Endang Dwi. Koedoeboen,Hendrik. 2012. *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan*. Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan.

RASIONALITAS ORANG TUA TERHADAP SISTEM *FULL DAY SCHOOL* DI LPI SABILILLAH MALANG

Dedi Anggriawan

Dosen Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(dedianggriawan.umm@gmail.com)

Abstract

Salah satu fenomena akhir-akhir ini adalah munculnya pelayanan *full day school*. Memasukkan anak ke sekolah *full day school*, belakangan ini menjadi salah satu solusi bagi orangtua yang keduanya bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana rasionalitas pilihan orang tua terhadap sistem *full day school* di LPI Sabilillah Malang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma definisi sosial. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *analysis interaktif model* Miles Huberman dan Saldana berupa *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan perspektif teori pilihan rasional James Coleman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas pilihan orang tua diawali dari pemahaman orang tua terhadap *full day school* yang didapat dari proses sosialisasi melalui keluarga, media massa dan teman, yaitu dipahami sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak, sebagai tempat belajar religiusitas, dan sebagai tempat elit dan bergengsi. Rasionalitas pilihan orang tua berupa keputusan yang mendatangkan banyak keuntungan (*benefit*) dan sedikit kerugian (biaya/ *cost*) bagi keluarganya, terutama keuntungan ekonomi yang kemudian diikuti keuntungan dalam dimensi-dimensi abstrak seperti pertimbangan religius, psikologis dan sosial

Kata Kunci: *Full Day School*, Orangtua, Rasionalitas

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena akhir-akhir ini adalah munculnya pelayanan *full day school*. Memasukkan anak ke sekolah *full day school*, belakangan ini menjadi salah satu solusi bagi

orangtua yang keduanya bekerja. Selain di nilai lebih aman, terjamin, jelas dan lebih terpercaya, dari pada harus membayar tenaga suster atau pembantu rumah tangga. *Full day school* juga menjadi solusi karena

anak bukan hanya sekedar "dititipkan", melainkan juga mendapatkan pendidikan lebih. Dalam konteks ini, ada kehilangan fungsi primer keluarga. Rata-rata keluarga menengah keatas yang bekerja di sektor formal dimana anak-anak tidak bisa diatasi oleh keluarga inti karena orang tua sudah tidak hadir untuk melaksanakan fungsi-fungsi primer keluarga secara utuh, yaitu fungsi sosialisasi, fungsi proteksi dan kasih sayang. Maka fungsi-fungsi keluarga yang hilang ini dialihkan ke lembaga sekunder.

Full day school memang secara konsep adalah diperuntukkan bagi orangtua yang kedua-duanya sama-sama bekerja dan tidak mampu memantau perkembangan karakter anak sepulang sekolah. Pemerintah melalui *full day school* menekankan pentingnya pembentukan karakter terutama pada level pendidikan dasar (SD dan SMP) karena menganggap bahwa porsi untuk pembentukan karakter sangat besar pada level tersebut.

Keberadaan LPI Sabilillah di Kota Malang merupakan fenomena edukatif yang mencuri perhatian

masyarakat, khususnya masyarakat kota Malang dan sekitarnya karena menjadi tumpuan dan prioritas sebagian besar orangtua siswa yang memiliki aktifitas padat waktu. Adanya perubahan sosial, kultural, karakter, dan religi pada anak akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran pada orangtua. Secara sosial perubahan yang terjadi didalam keluarga yang kedua orangtuanya bekerja mengakibatkan anak-anak mengalami keterlantaran.

Keterlantaran tersebut bukan secara ekonomi, tetapi keterlantaran yang meliputi aspek sosialisasi, proteksi, dan afeksi orangtua terhadap anak. Anak yang sebelumnya mendapat sosialisasi tentang nilai-nilai, budaya, agama dalam keluarga, tetapi orangtua tidak bisa menjalankan karena orangtua bekerja. Anak tidak mendapatkan kasih sayang seharian penuh karena orangtua bekerja dan anak-anak mulai tidak aman dirumah karena maraknya kasus penculikan anak dan penganiayaan anak oleh pembantu rumah tangga, maka keluarga kehilangan fungsi proteksi

dikarenakan kedua orangtuanya bekerja.

Secara kultural terbangun kultur baru dimana teman akrab anak tidak hanya tetangga dekat dan sebaya, tetapi lebih luas dibandingkan anak pada usia sekolah pada umumnya. Anak-anak usia sekolah saat ini sudah berbaur dengan orang dewasa diluar jangkauan orangtua. Dilihat dari aspek karakter, dimana pembentukan karakter anak sangat mudah terpengaruh oleh intervensi lingkungan yang buruk, serta secara religi pengetahuan dan minat anak-anak terhadap pendidikan agama mulai menurun karena pengaruh teknologi dan media yang semakin menjauhkan anak dengan pendidikan agama.

B. Pembahasan

Rasionalitas pilihan orang tua diawali dengan adanya pemahaman orang tua terhadap *full dy school*. Pemahaman orang tua berguna untuk menangkap substansi bagaimana orang tua mendefinisikan kehidupan sosial nya. Pemahaman orang tua didapat dari proses sosialisasi melalui keluarga, media

massa dan teman. Pemahaman terhadap substansi orang tua memahami *full day school* merupakan "jalan pembuka" bagi pembahasan rasionalitas selanjutnya. Hal ini dikarenakan seorang aktor tidak akan mampu menjelaskan apa rasionalitasnya secara mendetail, jika aktor tersebut belum bisa memahami substansi yang akan menjadi sebuah pertimbangan rasionalnya. Setelah ia memahami substansi yang menjadi pertimbangannya tersebut, baru ia bisa menjelaskan alasan rasionalnya yang dalam hal ini berupa pertimbangan *cost and benefit*.

1. Full Day School Sebagai Tempat yang Aman dan Nyaman Bagi Anak

Sebagian besar orangtua yang menjadi informan penelitian ini memahami *full day school* sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak selagi orangtua belum pulang bekerja. Dalam konteks ini adalah untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Orang tua punya pengalaman melihat dari berbagai media bahwa banyak kasus-kasus dimana anak-anak tidak aman jika diserahkan kepada

pembantu serta adanya ancaman-ancaman predator sosial baik dari dalam maupun dari luar rumah.

Hal ini dikarenakan adanya ketidak mampuan orang tua dalam menjalankan fungsi sebagai proteksi dan sosialisasi pada anak berupa pengasuhan dan mendidik anak secara intensif 24 jam dalam sehari. Orangtua mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka menuntut untuk selalu *standby* di kantor selama seharian penuh.

Ada beberapa hal yang membuat orangtua memahami *full day school* sebagai tempat yang aman bagi anak. Rasa aman orang tua di dasari oleh fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh sekolah tersebut, mulai dari konstruksi bangunan pagar sekolah yang tinggi, adanya satpam atau *security*, adanya jasa antar-jemput anak, dan adanya penyediaan makan siang untuk anak.

2. Full Day School Sebagai Tempat Untuk Belajar Religiusitas

Orang tua memahami *full day school* sebagai tempat untuk

belajar menjadi religiusitas selain pesantren. Dalam konteks ini orang tua merasa terancam, di mana sebuah perkembangan masyarakat semakin sekuler, sehingga anak-anak harus dibekali ilmu agama. Kondisi sosial masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai agama dan pengaruh negatif modernisasi dan globalisasi membuat orang tua khawatir. Dalam konteks ini orang tua merasa terancam, dimana perkembangan untuk masyarakat semakin sekuler, sehingga anak-anak harus dibekali ilmu agama. Sekulerisasi, menurut Harun Nasution adalah proses upaya penduniawian, yaitu proses melepaskan hidup duniawi dari kontrol agama, dengan demikian sekulerisasi adalah proses melepaskan diri dari agama dan bisa berakibat atau mengarah kepada atheisme (Harun, Nasution. 1995:188).

Masyarakat modern akhirnya menyadari, bahwa agama merupakan unsur fundamental bagi kebahagiaan merupakan suatu perkawinan rumah tangga.

Kehidupan yang banyak beragama dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Karena hanya dalam agamalah terkandung nilai-nilai moral yang sifatnya abadi. Bila dikaji lagi, perkawinan adalah ikatan antara dua insan yang bersifat keagamaan ketimbang suatu ikatan yang bersifat keduniaan (Su'adah. 2010:19-20). Dalam konteks ini, benefitnya adalah di *full day school* anak juga memperoleh ilmu umum dan ilmu agama secara sekaligus. Pendidikan agama yang diberikan oleh sekolah pun lebih banyak dan tidak sekedar teori, tetapi anak-anak juga dibiasakan untuk mengamalkan ilmu agama yang diperoleh dalam kehidupan sehari-harinya.

3. Full Day School Sebagai Tempat yang Elit dan Bergengsi

Sebagian orang tua murid dalam penelitian ini memahami *full day school* sebagai tempat elit dan bergengsi dikarenakan adanya dominasi dan polarisasi orang tua pada sekolah tersebut. Dalam konteks ini, sekolah dengan

sistem *full day school* sebagai "*battle arena*" bagi mereka untuk mempertahankan bahkan sebuah upaya menaikkan posisi atau status sosial mereka di masyarakat. Pemahaman ini bermula dari pandangan orangtua yang melihat *english branding* sebagai produk elit. Orang tua mengatakan bahwa sekolah dengan sistem *full day school* merupakan sekolah bagi kalangan tertentu dimana tempat berkumpulnya golongan elit masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemberian status elit pada sekolah *full day school* ini dikarenakan mahal biaya pendidikan di sekolah tersebut yang akhirnya melatar belakangi munculnya persepsi ini.

Selain itu, adanya pemahaman orang tua terhadap *full day school* sebagai tempat yang elit dan bergengsi juga dapat dilihat dari dominasi kendaraan mewah yang dimiliki orang tua sebagai alat transportasi untuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah tersebut. Penggunaan mobil mewah sebagai kendaraan pribadi

dan gaya hidup yang menganut paham hedonisme yang diperlihatkan oleh orangtua. Hal ini menunjukkan adanya ajang "pamer" yang dilakukan secara tidak langsung oleh orang tua.

Selain dominasi kendaraan mewah yang dimiliki orang tua, dominasi atribut mewah, mulai dari busana baju hingga *style* busana yang dikenakan oleh orang tua murid yang memperlihatkan kemewahan dan *trend mode* pada waktu tersebut juga memperlihatkan "kelas" mereka sebagai kaum elit dan bergengsi. Sebagian orang tua juga merupakan individu yang berprofesi sebagai pegawai institusi pemerintahan dan pegawai instansi terkemuka di Kota Malang. Hal ini tentunya dapat menunjukkan bahwa sebagian besar murid-muridnya berasal dari strata atas. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di *full day school* atas dasar prestise. Mereka akan memanfaatkan sekolah berlabel *full day school* ini untuk

menunjukkan posisi status social mereka di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua orang tua dan murid yang berasal dari kalangan strata atas dan memiliki pola gaya hidup hedonism. Sebagian orang tua dan murid di juga memperlihatkan pola gaya hidup sederhana.

Adapun rasionalitas orang tua memilih *full day school* adalah dengan adanya benefit atau keuntungan yang bersifat sosial, dimana orang tua bisa kenal dan bahkan dekat dengan *social figure* dan kalangan elit. Orang tua juga dapat membangun jaringan sosial, baik dengan sesama orang tua murid, dengan *social figure* maupun dengan kalangan elit. Hal ini dimanfaatkan oleh orangtua untuk menaikkan atau mempertahankan posisi sosialnya di masyarakat.

Menurut Horton, fungsi laten sekolah atau segala fungsi-fungsi sekolah yang berada dibalik pemahaman dan pemaknaan terhadap "sekolah" itu sendiri (tidak terindra) menurut Paul B Horton dan Chester L Hunt salah

satunya diantaranya yaitu: mempertahankan sistem kelas sosial, dimana sekolah cenderung dijadikan sebagai "jembatan" untuk mempertahankan status dan kelas sosial tertentu didalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya prestise dan tuntutan dalam kehidupan social (Paul, B Horton dan Chester, L Hunt. 2009:344-345).

Menurut Horton, fungsi penentuan status terus berlangsung didalam keluarga. Sejumlah keluarga terus menerus akan mempersiapkan anak-anak mereka untuk mempertahankan status keluarga, yang lain berusaha mempersiapkan anaknya untuk menghadapi mobilitas sosial (Su'adah. 2010:57).

C. Kesimpulan

Full day school dapat digunakan sebagai pengganti fungsi sosialisasi dan proteksi anak. Rasionalitas pilihan orang tua diawali dari pemahaman orang tua terhadap *full day school* yang didapat dari proses sosialisasi melalui keluarga, media massa dan teman, yaitu dipahami

sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak, sebagai tempat belajar religiusitas, dan sebagai tempat elit dan bergengsi. Rasionalitas orang tua dibentuk oleh adanya nilai ekonomis, religius, psikologi dan prestise. Rasionalitas pilihan orang tua berupa keputusan yang mendatangkan banyak keuntungan (*benefit*) dan sedikit kerugian (*biaya/ cost*) bagi keluarganya, terutama keuntungan ekonomi yang kemudian diikuti keuntungan dalam dimensi-dimensi abstrak seperti pertimbangan religius, psikologis dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintarto. (1989), *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Coleman, James S. (2011), *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundation of Social Theory)*, Bandung: Nusa Media
- Fukuyama, Francis. (1996). *TRUST: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity*. New York: FREE PRESS PAPERBACKS
- Haryanto, Sindung. (2012). *Spektrum Teori Sosial; Dari*

- Klasik Hingga Postmodern, Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. (2009). Sosiologi Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- Hurlock, Elizabeth B. (2008). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Kehidupan Edisi Kelima. Yogyakarta: Erlangga
- Khairuddin, H. (1997). Sosiologi Keluarga. Liberty: Yogyakarta
- Nasution, Harun. 1995. Islam Rasional. Mizan: Bandung
- Siswanto. (2007). Kesehatan Mental (Konsep, Cakupan dan Perkembangannya). Yogyakarta: CV Andi.
- Sudiharto. (2007). Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural. Jakarta: EGC
- Su'adah. (2010). Kesejahteraan Keluarga dan Isu Gender. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Sztompka, P. (2010). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group
- Jurnal**
- Diane DePanfilis. (2006). Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment and Intervention. USA: U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families Children's Bureau Office on Child Abuse and Neglect (Diakses di <https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/neglect.pdf> pada 29 Desember 2016 Jam 05:00 WIB).
- Sunarti, Eius. 2012. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Keluarga. Bogor: Institut Pertanian Bogor (Diakses di <http://www.euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-IKM-Perubahan-sosial-dan-Keluarga.pdf>)
- Wahyu, Asri W.A. 2013. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Semarang: Universitas Negeri Semarang (Diakses Di <http://lib.unnes.ac.id/17160/1/1201408037.pdf>).

STRATEGI ADAPTASI BUDAYA PARA EKSPATRIAT DI TANGUNGBALAI KARIMUN

Dinda Imelda

Alumni Mahasiswa Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(dindaimelda09@gmail.com)

Marisa Elsera

Dosen Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(marisaelsera@yahoo.com)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi adaptasi budaya para ekspatriat di Tanjungbalai Karimun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari empat orang ekspatriat, yaitu ekspatriat yang berasal dari India dan Malaysia, kemudian dua orang karyawan lokal, dan dua orang masyarakat lokal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang dilakukan oleh ekspatriat adalah, pertama, belajar bahasa setempat; kedua, mempelajari dan mengikuti nilai dan norma yang berlaku; dan ketiga, berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan-perbedaan strategi adaptasi yang dilakukan oleh ekspatriat yang bekerja yang berasal dari India dan Malaysia, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu agar mereka bisa bertahan dan tinggal di Tanjungbalai Karimun, serta dapat diterima oleh masyarakat Tanjungbalai Karimun, sampai waktu yang ditetapkan oleh perusahaan.

Kata Kunci: Strategi Adaptasi Budaya, Ekspatriat

A. Pendahuluan

Fenomena ekspatriasi saat ini terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan lahirnya perusahaan multinasional yang

giat dalam melebarkan sayapnya. Berbagai negara telah menjadi destinasi investasi dan penugasan internasional bagi para ekspatriat. Musadieq (2010:123) menjelaskan

bahwa menjadi ekspatriat adalah suatu peluang sekaligus tantangan, peluang karena bisa menjadi jembatan emas untuk meniti karir yang lebih baik. Menjadi tantangan ekspatriat karena bertugas keluar negeri penuh risiko dengan tingkat kegagalan yang cukup tinggi, yang penyebab utamanya adalah apa yang disebut *'shock culture'*. Selain itu calon ekspatriat harus mempertimbangkan dua faktor sebelum bertugas ke luar negeri, yaitu: kemampuan adaptasi budaya dan filosofi organisasi atas penugasan ke luar negeri, Copeland and Griggs, dalam Musadieg (2010:123).

Tidak hanya ada beberapa masalah besar yang dihadapi oleh ekspatriat ketika mereka dipindah tugaskan ke negara lain. Pertama, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya dan fisik yang berbeda. Banyaknya ekspatriat yang gagal dalam penugasan internasional bukan karena ketidakmampuan kompetensi teknik namun ketidakmampuan (*inability*) menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Serta faktor

terpenting kembalinya para ekspatriat sebelum waktunya (*premature return*) dalam penugasan terletak pada ketidakmampuan mereka sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, Black dan Gregersen dalam Sirait dan Raharjo (2009).

Sehingga untuk mencapai mencapai tujuannya para ekspatriat agar tidak gagal dalam penugasan ke luar negeri mereka harus memiliki kecakapan-kecakapan atau strategi-strategi agar bisa menjalin hubungan yang efektif dengan lingkungan sosial dan budaya dimana mereka ditugaskan. Strategi direncanakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam dan diluar perusahaan, artinya strategi menunjukan faktor -faktor mana yang harus mendapatkan perhatian utama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini merupakan acuan penting bagi ekspatriat untuk mempersiapkan strategi berdaptasi dengan budaya yang baru. Setiap ekspatriat mempunyai cara strategi adaptasi yang berbeda-beda tergantung pada penyesuaian diri seorang ekspatriat terhadap

budayanya yang baru. Adaptasi lintas budaya dapat dipahami dalam paradigma pembelajaran sosial dan mengacu pada seberapa baik individu mampu mengelola kehidupan sehari-hari dalam konteks budaya yang baru, Podrug et al., (2014:6).

Fenomena hadirnya ekspatriat ke Indonesia khususnya di Tanjungbalai Karimun merupakan hal menarik dikaji. Hal ini diperkuat dengan masyarakat Tanjungbalai Karimun sendirinya memiliki nilai dan norma serta budaya, yang mayoritas adalah masyarakat melayu, dan tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan para ekspatriat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda serta karakteristik demografi yang berbeda. Di dalam kehidupan bermasyarakat, proses interaksi budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Latar budaya juga mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Jika Ekspatriat tidak mampu dan mengalami kesulitan dalam memperhatikan pembelajaran budaya baru hal ini dapat mempengaruhi kemampuan orang

untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Hal ini ini dapat menyebabkan menurunnya motivasi untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Ketika gagal mengalahkan *culture shock*, mereka cenderung menjadi musuh warga negara tuan rumah, yang dapat menyebabkan cacat hubungan interpersonal, Ferraro (2006)

B. Pembahasan

Perbedaan latar belakang budaya menjadi awal para ekspatriat yang berasal dari India maupun Malaysia ini melakukan strategi adaptasi budaya di Tanjungbalai Karimun. Para ekspatriat yang bekerja di Tanjungbalai Karimun tidak mendapatkan pelatihan sebelum keberangkatan mereka dan mereka juga tidak pernah berkunjung ke Tanjungbalai Karimun sebelumnya. Semua hal yang mereka lakukan hanya atas dasar naluri mereka sendiri dan keinginan ekspatriat sendiri untuk mempelajari dan mencari tahu budaya di Tanjungbalai Karimun agar mereka bisa bekerja dan bertahan hingga sampai waktu yang ditetapkan oleh

perusahaan. Sehingga penyesuaian yang mereka lakukan adalah atas dasar kesadaran ekspatriat untuk melakukan adaptasi di Tanjungbalai Karimun. Adapun strategi adaptasi yang dilakukan para ekspatriat di Tanjungbalai Karimun antara lain :

1. Belajar Bahasa Setempat

Belajar bahasa setempat ini menjadi awal ekspatriat belajar lebih lanjut untuk melakukan strategi tahapan selanjutnya, ekspatriat memerlukan waktu 4 hingga 5 bulan untuk mempelajari bahasa lokal yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ekspatriat belajar secara autodidak dan terbiasa mendengar dan mengulang bahasa yang diutarakan oleh pekerja lokal dan masyarakat lokal. Sehingga 40-60 % ekspatriat dengan jangka waktu 4 hingga 5 bulan bisa berbicara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

2. Mempelajari dan mengikuti nilai dan norma yang berlaku.

Untuk mengetahui segala bentuk nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat, para ekspatriat ini belajar dengan

sendirinya yaitu bertanya dengan teman-teman lokal (pekerja lokal) dan masyarakat lokal, apa saja hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang boleh dilakukan. Seperti ,berkata kasar, tidak sopan, hal ini tentu saja merupakan sebuah nilai-nilai yang berlaku yaitu bagaimana tata perilaku yang menyangkut kesopanan di dalam masyarakat. Selain itu juga para ekspatriat belajar dengan teman-teman ekspatriat mereka dari Singapore yang pernah bekerja di Tanjungbalai Karimun. Selain itu ada beberapa hal yang di patuhi oleh ekspatriat ada hal-hal yang tidak di perbolehkan oleh masyarakat seperti minuman keras dan mabuk-mabukan di lingkungan masyarakat. Jika para ekspatriat ingin melakukannya , mereka memilih untuk minum di restoran atau diluar tidak mereka lakukan di rumah. Selanjutnya tidak tinggal dengan lawan jenis tanpa status pernikahan yang sah. Hal-hal ini merupakan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat

setempat yang dipatuhi dan diikuti oleh para ekspatriat yang tinggal di lingkungan masyarakat sehingga ekspatriat harus menjaga sikap berkelakuan baik kepada masyarakat dan pekerja lokal.

3. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat

Ekspatriat yang berasal dari India dalam hal ini melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat. Terlihat cara ekspatriat melakukan pendekatan diri mereka dengan masyarakat agar bisa diterima didalam masyarakat. Adapun cara yang dilakukan yaitu, dengan berbaur langsung dengan masyarakat, berusaha mengikuti kegiatan kegiatan yang dilakukan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti mengikuti perayaan peringatan hari-hari kebesaran masyarakat setempat. Para ekspatriat berusaha melakukan hal-hal yang baik agar mereka bisa masuk menjadi bagian dalam masyarakat serta menganggap masyarakat adalah

keluarga mereka di Tanjungbalai Karimun. Berbeda halnya dengan dengan upaya ekspatriat yang berasal dari Malaysia dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat. Agar mereka diterima masyarakat serta memanfaatkan keterbatasan waktu yang dimiliki untuk menyempatkan diri untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ekspatriat yang berasal dari Malaysia tetap menjalin komunikasi sehingga hal ini mendapat *feedback* dari masyarakat walaupun kadang mereka tidak memiliki waktu karena sibuk pekerjaan di perusahaan. Hal ini dikarenakan waktu yang diberikan perusahaan kepada ekspatriat yang berasal dari Malaysia ini yaitu dalam satu minggu, 5 hari ekspatriat harus bekerja di Tanjungbalai dan 2 hari mereka harus kembali lagi ke Singapura.

Strategi adaptasi budaya yang mereka lakukan mereka dapat dilihat agar ekspatriat menghargai perilaku dan gagasan tertentu sesuai dengan nilai dan norma

yang berlaku dan bagaimana perilaku dan gagasan tersebut dapat direproduksi dengan tepat. Serta mempraktikkan perilaku yang mereka perlukan. Parson (Ritzer, 2012: 408-412) untuk menjadi bagian dari sebuah sistem salah satu hal yang harus dilakukan adalah *adaptation* atau adaptasi. Dalam pencapaian adaptasi sebuah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Hal ini yang dilakukan oleh ekspatriat bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana mereka tinggal.

Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh para ekspatriat yang bekerja di Tanjungbalai Karimun ada alasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh para ekspatriat mengapa mereka harus melakukan strategi adaptasi budaya di Tanjungbalai Karimun agar mereka bisa bekerja dan tinggal di Tanjungbalai Karimun dan diterima oleh masyarakat kehadiran para ekspatriat. Pada

dasarnya menjalan subsistem yang disebut juga dengan *goal attainment* atau tujuan. Parsons (Ritzer, 2012: 408-412) menjelaskan bagaimana sebuah sistem harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

Pada dasarnya sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Sebagaimana halnya penjelasan Parson (Ritzer, 2012: 408-412) integrasi atau *integration* adalah penyesuaian diri dari masing - masing individu atau masyarakat yang berinteraksi dengan lingkup sosial yang memiliki nilai dan norma yang berbeda sehingga tercapai kesepakatan. Ekspatriat dalam penelitian ini melakukan integrasi kedalam masyarakat agar mereka bisa diterima dengan berbagai cara dan pendekatan yang mereka lakukan.

Adanya pemeliharaan pola dan motivasi diperlukan agar strategi yang diterapkan para ekspatriat

yang bekerja dan tinggal di Tanjungbalai Karimun dalam melakukan adaptasi budaya agar bias berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus. Motivasi disini tercipta dari pekerja lokal dan masyarakat lokal yang terus memberikan pengajaran, nasehat dan dorongan agar ekspatriat terus menjaga segala bentuk perilaku yang disesuaikan dalam masyarakat di Tanjungbalai Karimun. Pemeliharaan pola menurut Parsons (Ritzer, 2012: 408-412) adalah pemeliharaan nilai-nilai tertentu yang dianut dalam masyarakat seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya. Suatu pola ditanamkan sebelumnya dalam diri seorang individu, yang mempengaruhi interaksi seseorang dengan masyarakat. Interaksi yang dilakukan seseorang juga mempengaruhi nilai, norma, aturan dan budaya yang dimilikinya.

Dengan demikian masyarakat adalah merupakan suatu kumpulan sistem-sistem sosial

yang satu sama lain berhubungan memiliki ketergantungan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Menurut Parson terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Artinya adalah setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk masuk kedalam sebuah sistem masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsinya agar sistem berjalan sebagaimana mestinya. Adapun dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini adalah Berhubungan dengan kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Jika memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, maka sistem sosial itu dapat dikonstruksikan terdiri dari beberapa subsistem. Ada 4 (empat) subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama didalam kehidupan bermasyarakat yaitu *adaptation*, *goal attainment*, *integration* dan *latent pattern*

maintenance (Ritzer, 2012: 408-412). Agar bertahan hidup, sistem harus menjalankan ke empat fungsi tersebut sebagaimana dalam sistem sosial dengan konsep AGIL.

C. Kesimpulan

1. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh ekspatriat dari India dan Malaysia terdapat perbedaan-perbedaan. Hal yang paling terlihat adalah tindakan atau cara-cara yang dilakukan oleh ekspatriat. Ekspatriat India cenderung harus dengan sangat belajar ekstra untuk belajar melakukan adaptasi dengan bertanya dengan masyarakat lokal dan pekerja lokal, sedangkan ekspatriat Malaysia cenderung lebih santai dalam melakukan strategi adaptasi budaya di Tanjungbalai Karimun. Bukan hanya perbedaan latar belakang dan persamaan budaya saja, hal ini terjadi diluar itu yaitu perbedaan jabatan dan posisi jabatan juga membedakan bagaimana strategi adaptasi budaya yang dilakukan oleh para ekspatriat. Pertama jika dilihat dari waktu bekerja yang berbeda ekspatriat, ekspatriat Malaysia memiliki keterbatasan waktu sehingga membuat ekspatriat melakukan komunikasi dan interaksi yang juga terbatas. Sedangkan ekspatriat India setiap harinya dan memiliki waktu yang cukup dan intensitas bertemu dan berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat sehingga mereka harus lebih ekstra melakukan adaptasi budaya di Tanjungbalai Karimun.
2. Selanjutnya hasil yang dilihat oleh penelitian ini pola *latency* ini tidak berlaku secara baku, karena ekspatriat masih melakukan adaptasi-adaptasi hingga saat ini mereka masih belajar hingga saat ini walaupun sudah hampir 5 tahun keatas bekerja dan tinggal di Tanjung Balai Karimun. Kemungkinan akan terdapat perubahan kedepanya baik kepada ekspatriatnya maupun masyarakatnya.
3. Para ekspatriat tersebut tidak mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi budaya di Tanjungbalai Karimun namun

hanya fasilitas yang kurang memadai. Namun seperti yang dipaparkan oleh ekspatriat yang menjadi hambatan ekspatriat itu lebih ke arah fasilitas yang disediakan. Fasilitas-fasilitas yang kurang memadai di Tanjungbalai Karimun. Selain itu jarak yang sangat jauh bagi ekspatriat untuk menuju ke kota, namun untuk mengatasi hal ini ekspatriat membeli kebutuhan di warung-warung sekitaran tempat tinggal,

pada saat mereka harus melengkapi kebutuhan maka mereka akan pergi ke kota dan mereka akan memenuhi kebutuhan pada saat mereka melakukan perjalanan liburan ke Singapura. Namun hal ini tetap tidak membuat mereka merasa kesulitan atau menghambat mereka untuk tetap *survive* dan melakukan strategi adaptasi budaya.

Daftar Pustaka

- A.Adler & Peter. 2009. *Teknik-Teknik Observasi*. Dalam *Handbook Of Qualitative Research*. N.K Denzin & S. Lincoln. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arikunto.S. 2010. *Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahimsa-Putra H, dkk. 2003. *Ekonomi Moral,Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Yogyakarta: Kepell Press.
- Alfian,ed. 1985. *Presepsi Manuia Tentang Kebudayaan*. Jakarta : Gramedia.
- Basuki. Sulistyoy. 2006. *Metode Penelitian* . Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Bungin. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, ,Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Putra Grafika.
- Fontana & H. Fery. 2009. *Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan*. Dalam *Handbook Of Qualitative Research*. N.K Denzin & S. Lincoln. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Guba & Linconl. 2009.*Berbagai Paradigma yang Bersaing*

- dalam Penelitian Kualitatif.*
Dalam *Handbook Of Qualitative Research.* N.K Denzin & S. Lincoln. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 1965. *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Penerbit Universitas,.
- Martono.Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles & Huberman . 2009. *Manajemen Data dan Metode Analisis.* Dalam *Handbook Of Qualitative Research.* N.K Denzin & S. Lincoln. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Moleong. 2014. *Metdeologi Penelitian Kulaitatif.* Edisi revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Poloma. M. 2010. *Sosiologi Kontemporer.* Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Richard Grathoff. 2000. *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial.* Jakarta: kencana.
- Ritzer & Goodman. 2012. *Teori Sosiologi* .Bantul : Kreasi Wacana.
- Sugiyono. 2009. *Metdeologi Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- T. Sirait, Rahardjo. *Mengelola dan Mengembangkan Sumber Daya Manuai dalam Persaingan Global.* Jakarta : Penerbit Titra Wacan Media, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Soares, Hernani Agostinho. 2013. *Adaptasi Budaya Para Ekspatriat di Timor Leste.* Magister Manajemen Universitas Kristen Satya Wacana Semarang.

SIRI' NA PASSE DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KOTA TANJUNGPINANG

Zainal

Alumni Mahasiswa Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(zainal.anbiya21@gmail.com)

Sri Wahyuni

Dosen Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(sriwahyuni@gmail.com)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai siri' na passe dalam masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang untuk melihat bagaimana masyarakat Bugis dalam mempertahankan tradisi siri' na passe di kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena sosial yang kemudian menghasilkan data yang mendalam. Hasil penelitian adalah menarasikan bagaimana masyarakat Bugis dalam mempertahankan tradisi siri' na passe di Kota Tanjungpinang dengan cara penerapan siri' na passe dalam profesi atau pekerjaannya, dalam Keluarga serta dalam kehidupan bermasyarakat. Karena siri' na passe dalam profesi atau pekerjaan dipertahankan dalam etos kerja orang Bugis. Sedangkan dalam keluarga mereka mempertahankannya dengan menanamkan serta menjaga siri' na passe dalam tradisi dan bahasa Bugis yang merupakan identitas bagi mereka. Masyarakat Bugis di Kota Tanjungpinang menjaga mempertahankan siri' na passe dalam kehidupan bermasyarakat menjadikan diri mereka sebagai penyeimbang ditengah-tengah masyarakat kota Tanjungpinang yang heterogen.

Kata Kunci: Siri'na Fasse, Masyarakat Bugis

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negeri yang kaya dan penuh dengan keberagaman. Kekayaan itu tidak sebatas pada hasil alam saja, tetapi juga pada ragam suku, bahasa,

agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Beragam suku bangsa yang ada dan membentuk kelompoknya serta saling berinteraksi manusia satu dengan manusia yang lainnya, disetiap suku-suku yang ada memiliki

yang namanya budaya atau kebudayaan.

Bentuk kebudayaan disetiap suku yang ada tergantung dari kondisi geografis alam serta interaksi kehidupan sosial manusia sebagai anggota di dalam masyarakatnya. Kebudayaan umumnya sebagai hasil proses dari pikiran, karya dan hasil karya akibat adanya interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi hasratnya akan hubungan yang didasarkan pada tata cara dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hal yang terjadi di dalam setiap suku bangsa atau etnik yang ada di Indonesia.

Watak orang Bugis dan sifat kebudayaannya dapat ditelusuri dalam sejumlah *lontara'*. Dalam arti luas, *lontara'* berarti segala macam tulisan yang ditulis dengan huruf *sulapa' eppa'* (segi empat) yang berisikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Bugis pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya (Mashadi Said, 2016:65-66). Dalam masyarakat Bugis yang menjadi khas kebudayaannya, berdasarkan hasil telaah tersebut, Mattulada (1975)

mengemukakan (dalam Mashadi Said, 2016:23-24), bahwa inti kebudayaan Bugis adalah *Sirf. Siri'* yang mendinamisasi serta menjadi kekuatan pendorong peradaban Bugis dan selaku wujud totalitas kebudayaan Bugis.

Mattulada juga mengemukakan, bahwa peradaban (panggadereng) meliputi lima (5) unsur, yaitu:

1. *Ade'*, aturan perilaku di dalam masyarakat, berupa kaidah kehidupan yang mengikat semua warga masyarakat.
2. *Bicara*, aturan peradilan yang menentukan sesuatu hal yang adil dan benar, dan sebaliknya curang atau salah.
3. *Wari*, aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajaran dan hubungan kekerabatan dan silsilah.
4. *Rapang*, aturan yang menempatkan kejadian atau ikhwal masa lalu sebagai teladan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan masa kini.
5. *Syara'*, aturan atau syariat Islam yang menjadi unsur

panggadereng pada sekitar tahun 1611 M, pada saat Islam diterima sebagai agama resmi dan dianut secara umum oleh masyarakat Bugis. Panggadereng dan kelima unsurnya itu dibangun di atas konsep *siri'*, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Siri' yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah pedoman hidup bagi masyarakat Bugis khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya adalah sesuatu yang di anggap sakral dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi konsep *siri'* ini juga di bawa merantau oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan di tempat tujuan mereka.

Di Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibukota dari provinsi Kepulauan Riau terdapat satu daerah perkampungan bugis. Hal ini dikarenakan terdapat satu daerah yang penduduknya sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingga sebagian besar adalah masyarakat Bugis. Yakni di daerah hilir sungai carang, kelurahan Kampung Bugis kecamatan Tanjungpinang Kota.

Kelurahan Kampung Bugis masuk ke dalam wilayah administrasi di Kota Tanjungpinang. Padahal jika ditelisik lebih dalam, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis tidak sedikit masyarakat bersuku selain suku Bugis berdomisili disana. Namun meskipun berbeda suku, ciri khas mereka sebagai suku Bugis masih dapat ditemui sampai saat ini. Ketika berada dalam lingkungan yang heterogen, mereka masih bisa tetap menonjolkan identitas dan jati diri kesukuan mereka.

Seiringnya dengan pesatnya arus modernisasi serta proses interaksi yang terjadi di Kota Tanjungpinang, adanya kerisauan yang melanda orang-orang tua kepada generasi penerusnya dalam masyarakat Bugis yang berada di kota Tanjungpinang yang mempunyai kebudayaan yang heterogen.

B. Pembahasan

Dari hasil temuan peneliti walaupun masyarakat Bugis di Kota Tanjungpinang telah mengalami pergeseran dari sisi pemahaman, namun secara khusus mereka orang

Bugis masih menanamkan nilai-nilai yang ada pada *siri'* tersebut dalam proses interaksi sosialnya di masyarakat Bugis khususnya dan masyarakat Tanjungpinang pada umumnya dalam mencapai tujuannya hidup. *Siri'* na *pesse* dapat dipertahankan bagi masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang menurut hasil wawancara dengan informan dapat di lihat dalam tiga aspek yaitu *siri'* na *pesse* dalam profesinya, dalam kehidupan keluarga, serta dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengetahui bagaimana *siri' na pesse* dapat bertahan di kota Tanjungpinang, dapat dilihat dari penjelasan tentang tiga aspek diatas sebagai berikut:

1. *Siri' na Pesse dalam profesi atau Pekerjaan*

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melihat bagaimana masyarakat Bugis dalam mempertahankan tradisi *siri'* na *pesse* di kota Tanjungpinang dalam memaknai nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai sebuah etos dalam berkerja yang dimaknai dalam profesi yang dilakukannya.

Hal tersebut tercermin dalam sikap orang Bugis yang mengandung semangat pantang menyerah, pekerja keras serta selalu menekankan pada kejujuran. Menegakkan *siri'* na *pesse* merupakan persyaratan dasar bagi keberadaan orang Bugis, sehingga tradisi tersebut tidak mudah luntur di telan zaman.

Bicara tentang *siri'* na *pesse* berarti kita juga berbicara tentang etos kerja orang Bugis. Masalah etos tidak terlepas dari sistem budaya suatu masyarakat, sistem budaya yang abstrak tersebut tentunya tidak dapat kita lihat dan tak dapat pula di raba. Hal tersebut tentunya sangat identik di tiap kepala orang atau individu orang Bugis itu sendiri. Sistem budaya itu di terima oleh setiap orang atau kelompok masyarakat dari hasil perkembangan kebudayaannya. Aristoteles (386-449 SM) dalam (Mustafa dkk, 2003:2) mengatakan bahwa etos adalah sifat karakter, kualitas hidup, moral, dan gaya estetik, serta suasana hati seseorang atau

masyarakat. Etos berada pada lingkaran etika dan pola-pola tingkah laku dan rencana-rencana manusia.

Siri' na *pesse* dalam profesi berdasarkan hasil penelitian bagi informan dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik tentunya mereka dapat menjaga malu, harga diri nya agar tidak dianggap sebagai orang yang tidak berkompeten. Dari itu pula individu tersebut dapat sekaligus meningkatkan harkat martabatnya sebagai orang Bugis dari hasil kerja kerasnya sendiri. Proses dalam menjaga eksistensi nya sebagai orang Bugis dalam konsep *siri'* na *pesse* yang ditularkan sedari kecil tentu akan meningkatkan kualitas diri serta untuk menjaga taraf kesejahteraan hidup yang diinginkannya.

Hal itu dilakukan melalui proses bertindak berdasarkan adaptasi yang individu tersebut lakukan untuk menyesuaikan diri dan menyesuaikan lingkungan demi kebutuhan dan tujuan yang ingin mereka capai pada profesi mereka

yang mereka dapat dari perilaku sebagai orang Bugis yang punya tipikal pantang menyerah dan pekerja keras.

2. *Siri'* na *Pesse* dalam Keluarga

Pada perkembangan kota Tanjungpinang yang semakin heterogen ini, tentunya budaya Bugis *siri'* na *pesse* di kota Tanjungpinang akan mengalami perubahan pula dalam sisi pemaknaannya. Tentu harus ada langkah-langkah agar *siri'* na *pesse* tersebut tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Bugis yang telah beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya di kota Tanjungpinang. Salah satunya yang dapat menjaga serta mempertahankan budaya *siri'* na *pesse* dalam lingkungan pribadi yaitu keluarga. Keluarga yang merupakan tempat dimana kita menjalani proses sosialisasi dari budaya yang diwarisi secara turun temurun dari nilai-nilai dalam budaya Bugis dapat menjadi cara agar *siri'* na *pesse* tetap terjaga. Tentunya orang Bugis yang ada di Tanjungpinang dapat menjaga nilai-nilai tersebut dalam unsur-

unsur kebudayaan yang ada dalam diri orang Bugis dalam lingkungan keluarganya. Bahasa bagi orang Bugis merupakan identitas mereka dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan masyarakat lainnya di kota Tanjungpinang.

Penuturan bahasa Bugis bagi masyarakat Bugis erat kaitannya sebagai sebuah bentuk dalam mempertahankan kebudayaan mereka sebagai langkah dalam menjaga identitasnya ditengah-tengah keberagaman etnis di kota Tanjungpinang serta dalam kearifan lokal yang sudah melekat dengan budaya melayu. Bahasa Bugis itu pula yang menjadi sebuah simbol-simbol yang melekat agar tidak di anggap lupa dengan asal usulnya sebagai manusia Bugis. Hal lain didalam kehidupan keluarga orang bugis adalah dalam menjaga tradisi. Tradisi mempunyai artian adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan dalam kelompok masyarakat Bugis

yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi masyarakat Bugis menurut hasil yang didapat dari informan di kota Tanjungpinang ialah hal-hal yang berhubungan dengan adat kebiasaan orang Bugis dan masih menanamkan kebiasaan yang di dapatnya dalam proses interaksi dalam keluarga misalnya dalam kegiatan adat kenduri orang Bugis, cara menjamu tamu dengan baik yang sesuai dengan adab masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, menghargai tamu adalah suatu keharusan.

3. Siri' na Pesse dalam Kehidupan Bermasyarakat

Budaya *siri' na pesse* adalah pedoman hidup bagi masyarakat Bugis dalam menjalani kehidupannya. Penerapan nilai-nilai budaya *siri' na pesse* akan menempatkan pribadi-pribadi menjadi manusia yang menerapkan harga diri itu ialah harga mati, dan juga manusia yang bersifat unggul, utuh dan tidak terpecah belah. Budaya *siri' na pesse* mengandung nilai-nilai

universal yang mengajarkan seseorang menghargai hakikat penciptaannya, mengajarkan seseorang peduli terhadap kesulitan hidup sesama manusia serta tolong menolong. Pada era sekarang ini di kota Tanjungpinang, penerapan *siri'* na *pesse* sangat diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga keteraturan di dalam masyarakat. Kota Tanjungpinang yang bermacam etnis dan memiliki kearifan lokal yang ada, tentunya akan sangat rawan pergesekan antar etnis jika dalam diri orang Bugis jika tidak menerapkan *siri'* na *pesse* dalam diri sendiri. Salah penafsiran dalam memahami nilai-nilai *siri'* na *pesse* juga akan berakibat fatal dalam interaksi sosialnya di masyarakat lain.

Dalam mempertahankan pedoman hidup yang tertuang dalam nilai-nilai *siri'* na *pesse* diawali dari sikap perilaku kita kepada masyarakat lainnya dengan cara saling menghargai dan menghormati etnis-etnis yang lain yang berdasarkan tingkah

laku yang mencirikan sebagai masyarakat Bugis yang memegang teguh harkat dan martabat diri tapi tetap menjaga solidaritas dalam bingkai keberagaman. Selain itu cara mempertahankan tradisi *siri'* na *pesse* dalam kehidupan sosial masyarakat dapat pula dalam penanaman dalam bentuk simbol-simbol identitas adat orang Bugis itu sendiri dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat kota Tanjungpinang. Misalnya dalam penggunaan songkok *reca'* dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya dan keseharian. Pentingnya dalam menjaga identitas diri dalam upaya mempertahankan serta melestarikan budaya Bugis dalam masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang. Terkhusus kepada generasi muda Bugis yang pasti kedepannya akan menjadi penerus estafet dalam menjaga tradisi yang ada pada diri orang Bugis.

Dari ketiga kelompok tersebut seperti yang disampaikan oleh Talcot Parsons dalam skema AGIL, tentunya menjalani proses

adaptasi (*Adaptation*) dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya yang terjadi pada lingkungan pribadi serta lingkungan masyarakatnya. Tentunya hal tersebut tidak serta merta berjalan dengan mulus dalam proses pembauran atau adaptasi akan budaya yang ada pada masyarakat lokal kota Tanjungpinang maupun budaya yang menjadi pegangan dalam masyarakat Bugis yang berbeda. Namun hal tersebut tidak menjadikan sebuah perbedaan yang sampai mengarah kepada konflik yang nampak dalam masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang. Malahan mereka saling membantu dan bekerja sama dalam mempertahankan jati diri mereka sebagai orang Bugis.

Hal diatas terlihat bagaimana proses adaptasi orang Bugis asli berasal dari Sulawesi Selatan maupun dari Sumatera yang merantau tersebut dalam berinteraksi terbantu oleh masyarakat Bugis yang lahir dan besar di Tanjungpinang dalam

memahami kearifan lokal yang ada di kota Tanjungpinang dari kearifan lokal budaya orang melayu. Sebaliknya orang Bugis yang merupakan asli dari Tanjungpinang, tentu membutuhkan bantuan serta pemahaman akan nilai-nilai dalam budaya Bugis yang ada dalam *siri'* na *pesse*. Selain proses adaptasi, masyarakat Bugis dalam memelihara pola (*Latency*) yang menjadi motivasi dalam memelihara dan memperbaharui pola-pola untuk mempertahankan identitasnya sebagai orang Bugis. Hal tersebut terlihat bagaimana masyarakat Bugis menjaga identitasnya dengan berbahasa Bugis dalam mereka berinteraksi sesama orang Bugis di Tanjungpinang.

Dalam hal ini tentunya dalam menjalani proses adaptasi mereka dalam hal berinteraksi sebagai sesama orang Bugis mempunyai perbedaan satu sama lainnya salah satu yang paling menonjol ialah dalam hal berbahasa Bugis. Namun hal tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai yang

menjadi pedoman hidup orang Bugis yaitu *siri'* na *pesse*. Semua itu tentunya bagaimana masyarakat Bugis harus bisa menjelaskan dalam mencapai tujuan-tujuan utamanya (*Goal*) yaitu agar budaya Bugis di kota Tanjungpinang tetap eksis tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam *siri'* na *pesse*. Seperti dari hasil wawancara dari informan yang telah penulis uraikan pada penelitian ini yang dapat dilihat dalam etos kerja, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat mempertahankan *siri'* na *pesse* agar tetap eksis dan tidak hilang di kota Tanjungpinang.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan *Siri' Na Pesse'* dalam Masyarakat Bugis di Kota Tanjungpinang, *siri'* na *pesse* dapat dipertahankan bagi masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang menurut hasil wawancara dengan informan dapat di lihat dalam tiga aspek yaitu *siri'* na *pesse* dalam profesi nya, dalam kehidupan

keluarga, serta dalam kehidupan bermasyarakat. *Siri'* na *pesse* dalam Profesi bagi masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang, bahwa masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang dalam mempertahankan *siri'* na *pesse* dalam profesi nya atau pekerjaan mereka meliputi etos dalam bekerja semaksimal mungkin demi kebutuhan dan tujuan yang ingin mereka capai pada profesi mereka yang ia dapat dari perilaku sebagai orang Bugis yang punya tipikal pantang menyerah dan pekerja keras.

Sedangkan *Siri'* na *pesse* dalam keluarga bagi masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang dalam mempertahankan *siri'* na *pesse* dalam keluarga nya ialah Proses dalam menjaga *siri'* na *pesse* dalam hal bahasa dan tradisi tentu juga sebagai langkah untuk membudayakan *siri'* na *pesse* kepada generasi muda Bugis yang ada di kota Tanjungpinang yang mengalami perubahan sikap dan jati diri mereka sebagai orang Bugis. Tentu semua itu merupakan wujud dalam menjaga dan melestarikan dari nilai-nilai yang ada pada *siri'* na *pesse* dalam

lingkungan keluarga dan generasi penerus Bugis agar menjadi manusia yang seutuhnya. Dan yang terakhir, *siri'* na *pesse* dalam Kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat Bugis di kota Tanjungpinang dalam mempertahankan tradisi *siri'* na *pesse* di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dengan cara menjaga pola tingkah laku diri di dalam interaksi sosialnya di masyarakat.

Rasa saling menghormati serta menghargai dalam menjalani kehidupan orang Bugis harus menjadi kebiasaan yang dapat membantu kita dalam merawat warisan dari leluhur kita.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Dahlan, Ahmad. 2014. *Sejarah Melayu*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Damsar & Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Predana Media.

Hendrayady, Agus, dkk. 2011. *Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas*

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kadir, Daud, dkk.2008. *Sejarah Kebesaran Kesultanan Lingga-Riau*. Daik Lingga: Pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Narwoko, J.Dwi & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Prenada Media.

Nasaruddin, Koro.2009. *Makassar Terkenang Masa Lalu*. Mitracard Grafika

Ritzer, George.2012. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ritzer, George & Gouglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, .Jakarta: Prenada Media Group.

Ritzer, George. 2004. *Edisi terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Said, Mashadi. 2016. *Jati Diri Manusia Bugis*. Jakarta: Pro De Leader

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refila Aditama

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaeman, Munandar.2010. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Rusli, Muh. 2015. *Implementasi Nilai Siri' Na Pacce dan Agama Di Tanah Rantau; Potret Suku Bugis-Makasar Di Kota Gorontalo*. Jurnal al-Asas, Vol. III No. 2 Oktober 2015.

Sumber lain

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang. 2017. *Kota Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2017*. Bekasi: CV. Putra Abadi Jaya. Nomor: 1102001.2171 (Katalog)

<https://tanjungpinangkota.go.id/pages/profil>. Di akses pada tanggal 19 Juli 2018, jam 10.14 wib.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2015/02/10/jejak-sejarah-sultan-sulaiman-badrul-alam-syah-i-1722-1760/>. di akses pada tanggal 17 Februari 2018, jam 13.26 wib.

<https://www.id.wikipedia.org/wiki/mur>. di akses pada tanggal 20 Juli 2018 jam 14.14 wib

TINDAKAN ABORSI ILEGAL DI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

Rahma Wati

Alumni Mahasiswa Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(rahmawari.rw851@gmail.com)

Emmy Solina

Dosen Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(emmysolina84@gmail.com)

Abstract

Kasus aborsi bukanlah suatu hal yang asing di Indonesia, berdasarkan sumber data dari BKKBN bahwa diperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya. Kasus aborsi juga terjadi di salah satunya di Kota Tanjungpinang. Kasus aborsi di Kota Tanjungpinang memang tidak terekspos dimedia, hal ini bisa jadi karena sengaja ditutupi dan tidak diketahui oleh media sehingga akses untuk mendapatkan informasi mengenai aborsi cukup sulit. Berdasarkan informasi langsung dari informan bahwa aborsi ilegal yang dilakukan oleh pelaku bukan atas kemauan dari diri sendiri, ada pertimbangan perempuan untuk memilih aborsi. Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, yang mana peneliti akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, dengan mencari dan menggunakan data secara langsung pada informan yang dianggap kompeten. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tindakan sosial yang dicetuskan oleh Weber yang berlandaskan atas 4 tipe tindakan sosial yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan instrumental dan tindakan afektif. Berdasarkan analisa data yang didapatkan, diketahui bahwa faktor pendorong perempuan melakukan tindakan aborsi ilegal karena faktor pendorong dari luar diri perempuan itu sendiri.

Kata Kunci: Ilegal, Perempuan, Tindakan Sosial

A. Pendahuluan

Hak hidup merupakan salah satu hak yang ada dalam Hak Asasi Manusia (HAM), dan yang boleh mencabut Hak ini hanyalah yang

maha pemberi kehidupan tersebut. Membahas mengenai HAM ini tentu sangat bertentangan dengan aborsi. Dimana aborsi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan

nyawa manusia yang ada didalam kandungan. Aborsi bukanlah hal yang asing. Kasus aborsi seringkali kita saksikan di media, baik melalui media elektronik, media cetak maupun media sosial. Untuk kasus aborsi tercatat data dari WHO (*World Health Organization*/ badan kesehatan PBB) yang bekerja sama dengan Guttmacher Institute menemukan bahwa, diperkirakan setiap tahun terjadi sekitar 56 juta tindakan aborsi di seluruh dunia pada tahun 2010-2014. Penelitian WHO yang dimuat Tempo tahun 2016 menemukan bahwa penurunan angka aborsi di kota-kota yang melegalkan aborsi lebih sedikit yakni 34 per 1000 perempuan dibandingkan dengan angka aborsi di kota-kota yang melakukan pelarangan aborsi mencapai 37 per 1000 perempuan. (Sumber: Tempo edisi 2016). Sedangkan berdasarkan sumber informasi yang didapatkan dari BKKBN data tahun 2006, terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi setiap tahunnya di Indonesia.

Hal ini sangatlah menyedihkan karena berarti setiap tahunnya ada 2 juta nyawa tak berdosa telah

dibunuh. Ditahun yang sama pula didapatkan pula data bahwa kehamilan remaja di Indonesia yang disebabkan karena hamil di luar nikah akibat perkosaan sebanyak 2,3%; karena sama-sama mau sebanyak 8,5% dan tidak terduga sebanyak 39%. Seks bebas sendiri mencapai 18,3%. Pada tahun 2010, hamil di luar nikah karena diperkosa sebanyak 3,2%; karena sama-sama mau sebanyak 12,9% dan tidak terduga sebanyak 45%. Seks bebas sendiri mencapai 22,6%. Selain itu, menurut data yang diperoleh dari Media Indonesia, rata-rata terdapat 17% kehamilan yang terjadi per tahun, merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Meski masalah aborsi tidak tampak secara jelas didepan mata, namun aborsi sesungguhnya berkaitan erat dengan persoalan psikologi. Secara mental, perempuan yang memilih melakukan aborsi apapun alasannya, sedang mengalami kegalauan, rasa tidak percaya diri, kekhawatiran yang berlebihan, keputusasaan, atau bahkan penyesalan dan perasaan bersalah dan berdosa. Gangguan ini disebut *Pasca Abortion Syndrom*.

Apalagi aborsi memiliki dampak yang besar seperti misalnya komplikasi, hal ini tidak jarang berujung pada kematian perempuan, atau cacat permanen jika tidak ditangani oleh pihak yang bukan dibidangnya. Belum lagi tekanan atas pilihan aborsi yang secara social dianggap sebagai tindak kriminal. Alih-alih mendapat dukungan dan penguatan untuk meringankan beban fisik dan psikis yang menerpanya, perempuan malah dicela dan dicaci atau bahkan dihukum penjara.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti mendapatkan informasi bahwa perempuan aborsi melalui berbagai cara, mulai dari konsumsi obat-obatan khusus, bantuan pihak pijat urut dan tim medis. Harga dari masing-masing cara yang ditempuh tersebut bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Dari berbagai cara yang dilakukan ini dengan penanganan pihak medis adalah cara yang paling terjamin dari segi keamanan karena ditangani langsung oleh pihak yang memiliki latar belakang ilmu kesehatan yang telah

terjamin dibandingkan dengan cara-cara aborsilainnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, kehidupan perempuan yang telah melakukan aborsi tidaklah tampak berbeda dari kehidupan para perempuan umumnya. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, ada yang masih menempuh dunia pendidikan dan menajalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga sambil bekerja. Hubungan dengan masyarakat sekitar pun tidak ada terlihat yang ganjal. Hanya saja dari penuturan salah satu informan mengatakan bahwa ia seringkali mencoba menghindari orang-orang terdekat yang telah mengetahui dirinya telah melakukan tindakan aborsi ilegal. Hal ini dilakukan untuk menghindari rasa tidak nyaman akan tatapan yang seperti mencela. Salah satu informan hingga melakukan perpindahan tempat domisili meskipun tarif *kost* yang lebih tinggi dari *kost* sebelumnya.

Hal ini didukung dengan kenyataan yang ada bahwa aborsi dianggap melanggar norma masyarakat dan aturan pemerintah.

Seperti yang kita tahu bahwa daerah provinsi Kepulauan Riau khususnya di daerah Ibu Kota yaitu Tanjungpinang merupakan tanah Melayu. Daerah ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Budaya Melayu kental sekali disini, yang mana budaya Melayu identik dengan Islam dan orang Melayu kuat sekali mempertahankan budaya malu. Dalam budaya Melayu garis keturunan berdasarkan dari ibu atau perempuan maka dari itu perempuan diharapkan menjunjung tinggi budaya malu untuk menjaga marwah keluarga dengan berperilaku dan etika yang baik saat bersosialisasi di lingkungannya.

B. Pembahasan

Fenomena kasus aborsi ilegal bukanlah hal yang asing lagi ditengah masyarakat. Penelitian mengenai aborsi bukanlah hal yang baru. Dari referensi yang didapatkan peneliti, berikut ini beberapa penelitian dan artikel berkaitan dengan aborsi, yaitu :

1. Dari tesis Wahyu Permana, Pascasarjana UI, 2011, dalam

skripsinya tentang pengetahuan dan sikap remaja terhadap aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan di salah satu SMA di Kab. Simalungun menemukan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan sikap menerima dan tidak menerima terhadap aborsi. Mereka yang memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi memiliki sikap menolak aborsi.

2. Penelitian yang berjudul Melawan Kredo Aborsi: "Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan" dilakukan oleh Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah pada tahun 2016. Dalam penelitian ini meneliti gerakan yang mendukung aborsi bukanlah tindakan kriminal. Perempuan sebagai sebuah identitas sosial, tak pernah luput dari dominasi kuasa pengetahuan, baik yang sifatnya patriarkis hingga yang sifatnya politis. Penelitian ini bermaksud melihat dan

memahami bagaimana “Gerakan Abortion Is Not a Crime” ini berlangsung dan praktik-praktik aktivisme seperti apa yang dilakukan oleh LSM Samara dalam melawan wacana dominan tentang aborsi di Indonesia.

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Andrie Hertanti pada tahun 2013 dengan judul Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja memiliki alasan yang rasional untuk melakukan proses aborsi tersebut, juga bahwa aborsi dipandang sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah pada saat itu. Selain adanya resiko fisik dan ekonomi, ada juga resiko sosial. Namun ternyata para remaja tidak merasakan resiko sosial tersebut, karena lingkungannya mendukung untuk melakukan aborsi tersebut. Kurangnya kontrol orang tua dan

lingkungan pergaulan remaja perkotaan menjadi pemicu banyaknya aborsi ilegal yang terjadi. Hal tersebut didukung pula dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis dan tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain, sehingga remaja yang melakukan aborsi merasa hal tersebut adalah permasalahan masing-masing individu.

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut diatas mengenai kasus aborsi tentulah berbeda dengan penelitian mengenai aborsi yang peneliti teliti disini. Disini peneliti ingin mencari tahu apakah yang mendorong perempuan untuk melakukan aborsi. Karena selama ini secara umum yang diketahui masyarakat bahwa perempuan yang hamil diluar nikah jika melakukan aborsi bahwa atas dasar menghindari rasa malu. Untuk menghindari akan dikucilkan dari lingkungan, dipandang sebelah mata dan dicemooh.

Adapun beberapa cara yang ditempuh perempuan untuk aborsi yaitu dengan minuman *Kiranti*,

Kratingdaeng dan mengonsumsi nanas muda dengan jumlah konsumsi yang berlebihan, mengonsumsi obat-obatan seperti *gastrul* atau *cytotec*, aborsi dengan penanganan pijat urut hingga penanganan pihak medis dengan cara kuret. Dari berbagai cara yang dilakukan ini dengan penanganan pihak medis adalah cara yang paling terjamin dari segi keamanan kesehatan karena ditangani langsung oleh pihak yang memiliki latar belakang ilmu kesehatan yang telah terjamin dibandingkan dengan cara-cara aborsi lainnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, sesuai dengan peneliti paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi ilegal Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ini didorong karena berbagai faktor. Adapun faktor pendorong perempuan melakukan tindakan aborsi ilegal adalah sebagai berikut:

Pertama, keluarga memaksa untuk aborsi. Keluarga

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan si perempuan. Setelah peneliti gali lagi, bahwasanya keluarga memaksa perempuan aborsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keluarga tidak suka dengan pihak laki-laki. Dengan kondisi laki-laki yang masih belum bekerja tetap dan kondisi pendidikan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, keluarga menganggap laki-laki tersebut tidak dapat mendampingi anaknya dalam kehidupan rumah tangga.
2. Keluarga merasa malu anaknya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah merupakan salah satu aib yang hingga saat ini masih tertanam dalam masyarakat. Keluarga tidak mau menanggung malu sehingga aborsi adalah jalan satu-satunya. Sedangkan bagi perempuan yang telah menikah tidak merasakan hal ini, dikarenakan telah berstatus menikah.

Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak menjadi faktor

pendorong bagi perempuan yang berstatus belum menikah. Sedangkan bagi perempuan yang telah menikah, faktor ekonomi menjadi pertimbangan yang kuat untuk aborsi. Alasan perempuan memilih aborsi karena ekonomi seperti berikut: kondisi suami yang belum bekerja tetap, kondisi suami yang telah meninggal, keterikatan perjanjian kerja, ketidaksiapan perempuan menanggung biaya untuk membesarkan dan mengasuh anak.

Ketiga, dorongan dari teman dan pasangan. Karena dorongan teman, perempuan yang belum menikah memilih aborsi atas pertimbangan masih sekolah dan keterikatan beasiswa selama kuliah. Sedangkan perempuan yang telah menikah memang pasangannya tidak secara langsung memaksa untuk aborsi namun atas pertimbangan dan tuduhan akhirnya perempuan yang telah menikah memilih aborsi sebagai solusi.

Selain faktor pendorong aborsi, peneliti menemukan temuan-

temuan yang terkait dengan aborsi yaitu adanya jaringan-jaringan kerjasama antar pihak medis dalam penanganan aborsi, adanya kesadaran perempuan yang telah menikah untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan sedangkan perempuan yang belum menikah lebih menjaga atau mengontrol diri dalam berhubungan dengan lawan jenis dengan tidak melakukan hubungan badan dan fokus ke pencapaian di masa depan.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoes.
- Damsar, 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: PT. Aditya Andrenia Agung
- Ekotama, Pudjiarto Widiartana, 2005, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan ; Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

- Laurence Neuman, William. 2000. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach, 4th Addition*. USA: Allyn & Bacon
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Poloma, Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George, J. Godman, Douglas. 2010. *Teori sosiologi modern*, Jakarta: Prenada Media Group
- Siahaan, Hotman. 1986. *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Max Weber : Konsep Konsep Dasar Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofowean, Sulchan. 2005. *Kapan Dimulainya Kehidupan, Tahap-Tahap Kehidupan Janin Dalam Kandungan Dan Aborsi Legal Perseptif Medis*. Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana FH UAJY
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2009. *Metode penelitian sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Penelitian Terdahulu/Skripsi :**
- Andayani, 2005, Perilaku Seksual Pranikah Dan Sikap Terhadap Aborsi (Studi Korelasi Pada Mahasiswa Program Psikologi Undip Semarang), Jurnal Psikologi Undip, Vol. 2, No.2, Desember 2005 (1-10)
- Atasherdatni. 1999. Aborsi dalam Perspektif Kesehatan Wanita. www.jurnalperempuan.com
- Azwar, A. 1987. Perkawinan dan Kehamilan pada Wanita Usia Muda. Jakarta : IAKMI.

- Fengxue, Yung .Attitudes toward adolescent pregnancy, induced abortion and supporting health services among high school students in Phuttamonthon district, Nakhon Pathom province, Thailand. 2003.
- Limbongtasik Pongmasangka , Gita (2011). Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Perilaku Abortus Criminalis Di Wilayah Tana Toraja. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kusumahadi, Pandu. 1991. Hamil Sebelum Menikah., Siapa yang . UIN Sultan SyarifKasim Riau. 2014
- Yulfianto, Ade dan Jumaynah, Fullah . Melawan Kredo Aborsi: "Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan". 2016.
- Internet:**
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/12/060770548/who-tiap-tahun-56juta-janin-digugurkan> (diakses pada 10 Juni 2016 pukul 22.02 WIB)
- <https://www.hariankepri.com/ternyata-bidan-aborsi-dari-tanjungungat> (diakses pada 10 Juni 2016 pukul 21.32 WIB)
- Salah?. WKBT Adhiwarga PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Permadi, Wahyu.(2011). Faktor-faktor yang mmempengaruhi sikap permisif terhadap aborsi pada remaja tidak kawin. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Permana, Wahyu. Pengetahuan dan sikap remaja terhadap aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan remaja di Kabupaten Simalungun. 2011.
- Emilia, Susanti. Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu www.tanjungpinangpos.co.id/2014/8/7243/hamil-2-bulan-ditolak-orangtua/ (diakses pada 14 Juni 2016 pukul 23.15 WIB)
- <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm> (diakses pada 10 Maret 2017 pukul 16:46 WIB)
- <http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/20969-keluarga-oknum-polisi-lapor-balik.html> (diakses pada 14 Juni 2016 pukul 23.45 WIB)
- <http://www.depkes.go.id> (diakses pada 10 Juli 2016 pukul 21.16 WIB)
- <http://www.kpai.go.id> (diakses pada 25 Juni 2016 pukul 23.19 WIB)

JURNAL

MASYARAKAT MARITIM

JURNAL SOSIOLOGI
Di terbitkan oleh :
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dompok, Tanjungpinang, Kep. Riau
Telp (0771) 7001550, Faksimile (0771) 7038999
Email : sosiologi.umrah@gmail.com

ISSN 2580-7439



9 772580 743004 >